

ABSTRAK

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menyediakan barang dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun demikian, masalah Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember telah lama menjadi isu yang belum terselesaikan, terutama terkait penggunaan trotoar untuk berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan perizinan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008. Namun, penerapan peraturan tersebut belum sepenuhnya efektif. Meskipun Perda ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan sanksi bagi pelanggaran ketertiban dengan tujuan menciptakan keindahan dan ketertiban kota, banyak Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa yang masih beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 mewajibkan setiap pedagang untuk memiliki izin lokasi, tetapi kenyataannya banyak pedagang yang belum mematuhi ketentuan ini. Penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelaksanaan dan pengawasan peraturan guna mencapai tujuan penataan Pedagang Kaki Lima yang efektif di Kabupaten Jember

Kata Kunci: Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Daerah, Penanganan

ABSTRACT

The presence of Street Vendors (PKL) has played a crucial role in creating job opportunities and providing affordable goods for low-income communities. However, the issue of Street Vendors in Jember Regency has long remained unresolved, particularly concerning the use of sidewalks for entrepreneurial activities. This study aims to examine the Jember Regency government's policy on managing PKL permits based on Regional Regulation No. 6 of 2008 concerning Street Vendors. The research employs the Statute Approach and the Conceptual Approach, using a normative research methodology. The findings reveal that the enforcement of regulations regarding PKL in Jember Regency is governed by Regional Regulation No. 6 of 2008. However, the implementation of these regulations has not been fully effective. Although this regulation is designed to ensure legal certainty and impose sanctions for violations with the aim of creating urban beauty and order, many Street Vendors on Jalan Jawa continue to operate without official permits from the government. Article 6, paragraph (1) of Regional Regulation No. 6 of 2008 requires each vendor to have a location permit, but in reality, many vendors have not complied with this requirement. The study highlights the urgent need for improved implementation and oversight of regulations to achieve effective management of Street Vendors in Jember Regency.

Keywords: *Policy, Street Vendors, Local Government, Handling*